

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia atau yang dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam UUD 1945 (Pasal 18) merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang telah ditentukan sebagai urusan pemerintah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. NKRI dikenal dengan nama Nusantara yang artinya negara kepulauan, karena wilayahnya meliputi pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Posisi Indonesia berada pada 6° lintang utara (LU) – 11° lintang selatan (LS), dan 95° bujur timur (BT) – 141° bujur timur (BT).<sup>1</sup>

Indonesia menjadi negara dengan sebutan Negara Kepulauan karena memiliki ciri sebagai berikut: memiliki struktur pulau-pulau yang tersebar luas dengan jumlah lebih dari 13.000 pulau besar dan pulau kecil (ada 17.508 pulau), memiliki garis pantai dengan panjang sekitar 81.000 Km dan memiliki ciri khas pada lingkungan laut yang masih alami.<sup>2</sup> Kondisi ini menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara maritim,

---

<sup>1</sup> <https://perpustakaan.id/profil-negara-indonesia/> diakses 23 Januari 2018

<sup>2</sup> M. Daud Silalahi. *Pengaturan Hukum Lingkungan Laut Indonesia dan Implementasinya Secara Regional*. Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal.66

karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas lautan kurang lebih 3.273.810 km<sup>2</sup> atau sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah perairan dengan perbandingan 70% lautan dan 30% daratan.

Indonesia sebagai negara maritim mempunyai berbagai potensi sekaligus permasalahan baik internal maupun eksternal. Potensi yang ada sebagai negara maritim diantaranya adalah letak yang strategis diantara dua benua dan dua samudera, mempunyai kekayaan laut yang melimpah baik perikanan maupun keanekaragaman hayati laut lainnya serta segala potensi pertambangan yang ada. Sedangkan permasalahan yang ada diantaranya masalah internal terkait dengan pengelolaan sumber daya laut yang masih kurang optimal, kemampuan pengawasan maritim Indonesia yang masih kurang karena luasnya wilayah, struktur kementerian yang terkait dengan kelautan yang belum bersinergi dengan baik. Selain itu permasalahan dari eksternal sering muncul terkait isu perbatasan, pencurian sumber daya kelautan, konflik perbatasan, serta isu keamanan regional. Sebagai negara yang berbatasan dengan banyak negara tetangga, maka peluang konflik perbatasan menjadi besar. Karena letaknya yang strategis, maka ancaman keamanan regional juga besar. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim harus mampu memanfaatkan posisinya serta menjaga keamanan regionalnya.<sup>3</sup>

Laut China Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik dengan luas sekitar 3,5 juta km<sup>2</sup> karena merupakan

---

<sup>3</sup> Lasabuda, R. (2013). Pembangunan wilayah pesisir dan lautan dalam perspektif negara kepulauan republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*, 1(2), 92-101. Hal. 92.

wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudera yang ada. Secara geografis Laut China Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, yang batas selatannya 3°, lintang antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di China daratan. Laut China Selatan terletak di sebelah Selatan Republik Rakyat China (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah Timur Vietnam. Kawasan Laut China Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama antar negara yang berbatasan. Sampai saat ini konflik yang ada merupakan konflik perbatasan wilayah yang melibatkan enam negara secara langsung, yaitu Brunei, China, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam terkait dengan klaim masing-masing pihak terhadap Kepulauan *Spratly* dan Kepulauan *Paracel*. Secara tidak langsung, sengketa Laut China Selatan akan melibatkan pula pihak-pihak lain yang terkena spill over, seperti Amerika Serikat yang sangat menjunjung tinggi kebebasan bernavigasi. Indonesia yang tidak ikut mengklaim wilayah di perairan tersebut mulai “terganggu” oleh klaim sepihak China pada 1992 ketika China menerbitkan peta unilateral Laut China Selatan berupa sembilan

garis putus putus di Laut China Selatan (*Nine-Dash Map*) yang masuk ke wilayah ZEE Indonesia di utara Kepulauan Natuna.<sup>4</sup>

Kepulauan Natuna sendiri mempunyai arti penting sebagai wilayah perbatasan negara yang menunjukkan geopolitik dan kekuasaan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Argumen penting yang melatarbelakangi konsep pendekatan wilayah perbatasan ada tiga, yaitu *border*, *cross border* dan *trans border*.<sup>5</sup> Dalam konteks perbatasan di Kepulauan Natuna, *border* atau perbatasan dipertimbangkan karena letaknya jauh dari pemerintah pusat, *cross-border* menunjuk pada pemahaman bahwa daerah perbatasan merupakan zona di mana dua atau lebih kebudayaan masyarakat, suku bangsa atau moda produksi tertentu bersinggungan, *trans-border* menunjuk pada daerah perbatasan merupakan zona yang oleh negara pusat dianggap sebagai wilayah rentan mendapat pengaruh dari negara lain.<sup>6</sup> Kepulauan Natuna sebagai wilayah perbatasan juga mempunyai arti penting bagi Indonesia dalam hal sumberdaya kekayaan alam berupa kekayaan perikanan yang melimpah, kekayaan tambang dan gas alam, serta kekayaan pariwisata serta jalur perdagangan internasional yang ramai.

Kepulauan Natuna dalam sejarahnya tepatnya pada masa orde baru masih mengalami konstruksi marginalitas baik dari sisi

---

<sup>4</sup> Prabowo, E.E., 2013. Kebijakan Dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Di Laut China Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(3), pp.118-129. Hal 118.

<sup>5</sup> Wu, C. T. (2001). Cross-border development in a changing world: Redefining regional development policies. *Contributions In Economics And Economic History*, 2, 21-38. Hal 23.

<sup>6</sup> Marsetio, 2012. Konstruksi Marginalitas Daerah Perbatasan (Studi Kasus Kepulauan Natuna). *Disertasi*, Kajian Budaya dan Media , Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada. Hal 18.

perekonomian maupun pembangunan sosial-budaya serta kesejahteraannya, sehingga kemiskinan, ketimpangan dengan wilayah lain serta ketidakberdayaan masyarakatnya ditemui diberbagai sektor. Wilayah kaya tetapi miskin karena konsep pengembangan negara yang masih salah terutama dalam pendekatan pembangunan yang lebih mementingkan aspek agraris, bahkan di wilayah perairan seperti Kepulauan Natuna yang seharusnya dengan pendekatan pembangunan berbasis maritim.<sup>7</sup> Namun perkembangan politik pada masa reformasi dan dalam rezim Joko Widodo, pembangunan maritim sudah mulai dilakukan dengan baik.

Konflik Laut China Selatan merupakan isu keamanan regional yang hingga kini masih belum mencapai titik penyelesaian, serta rawan mengganggu stabilitas kawasan di masa yang akan datang. Sengketa ini diawali oleh klaim sepihak negara China yang memperluas wilayah perairannya hingga menjangkau wilayah perairan Filipina, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Konflik ini memerlukan penyelesaian yang bersifat tetap dan mengikat, karena jika tidak potensi perebutan wilayah sangat besar. Jika hal ini terjadi maka stabilitas kawasan akan terganggu yang akan mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik dan keamanan.<sup>8</sup>

Terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang menjadi alasan utama mengapa negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan. Pertama, mengandung sumber kekayaan alam yang

---

<sup>7</sup> Ibid., Hal i.

<sup>8</sup> Pudjiastuti, T. N., & Prayoga, P. (2016). Asean Dan Isu Laut China Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional Asia Timur. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(1), 17. Pp 99-115. Hal 100.

sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi, keanekaragaman hayati dan perikanan serta kekayaan laut lainnya. Kedua, merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktifitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negara-negara seperti China dan negara-negara di kawasan Laut China Selatan, bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah Laut China Selatan yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara.<sup>9</sup> Ketiga hal mendasar tersebut menjadi daya pikat banyak negara untuk ikut ambil bagian dari wilayah ini, termasuk Amerika yang pada dasarnya tidak mempunyai wilayah di kawasan regional ini.

Sumber lain menyebutkan bahwa alasan pokok Laut China Selatan diperebutkan diantaranya adalah karena merupakan wilayah strategis, dikelilingi 10 negara. Kemudian kaya akan sumber daya perikanan, merupakan penyumbang 10% dari perikanan global. Dan merupakan potensi migas yang sangat besar, 11 miliar barrel cadangan minyak dan 190 triliun kaki kubik kandungan gas alam. Sedangkan kapal-kapal ikan negara lain selalu incar Natuna karena terdapat potensi perikanan 504 ribu ton atau penyumbang 21% hasil tangkapan ikan Indonesia.<sup>10</sup>

---

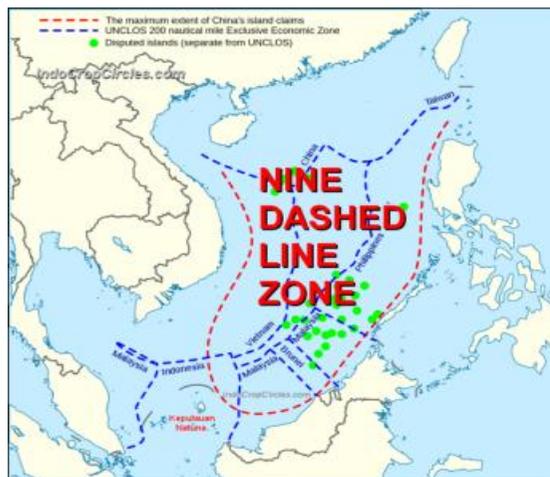
<sup>9</sup> Nainggolan, P. P. *Konflik Laut China Selatan dan Implikasinya Terhadap Kawasan*. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia, 2013: Hal. x-xi.

<sup>10</sup> Katadata.com. 13/7/2016. <https://katadata.co.id/infografik/2016/07/13/kenapa-laut-china-selatan-diperebutkan> (diakses 12 Desember 2017, pukul 21: 26 WIB)

Potensi sumber daya alam yang besar tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi semua negara untuk berusaha menguasainya, termasuk China dengan isu “*Nine-Dashed Line*”.

Negara-negara kawasan yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan menggunakan dasar historis dan geografis dalam memperebutkan kepemilikan atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan yaitu *Paracel* dan *Spratly*. China misalnya, mengklaim wilayah sengketa tersebut berdasarkan kepemilikan bangsa China atas kawasan laut dan dua gugusan kepulauan *Paracel* dan *Spratly* sejak 2000 tahun yang lalu, kemudian Pemerintah China mengklaim telah mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan China atas Laut China Selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah “*Nine-Dashed Line*”. Peta tersebut menabrak wilayah negara-negara di Asia seperti, Filipina, Malaysia, Brunei Darusalam serta Vietnam, bahkan termasuk Indonesia di Blok-Natuna. Gambar “*Nine-Dashed Line*” dapat dilihat dalam Gambar peta atau *mapping* berikut ini:

Gambar 1.1. Peta Kawasan laut China Selatan



Sumber: [www.IndoCropCircles.com](http://www.IndoCropCircles.com)

Sementara itu, Indonesia dan negara ASEAN lainnya telah mengikuti aturan *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)* dan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* yang sudah baku. Hal ini berarti jika ada suatu negara yang ingin mengklaim suatu wilayah yang termasuk ke dalam ZEE Indonesia maka akan menjadi sebuah masalah yang besar karena akan mengganggu integritas wilayah Indonesia. Indonesia bukan negara yang mengklaim wilayah (*non claimant state*), namun Indonesia terlibat dalam konflik ini. Keterlibatan Indonesia dalam konflik ini karena didasari pada kepentingan nasional untuk turut serta dalam pemeliharaan perdamaian dunia dan kesadaran akan manfaat dari penyelesaian konflik tersebut.<sup>11</sup>

Perkembangan konflik Laut China Selatan kini semakin meluas dan berimplikasi kepada permasalahan yang dianggap lebih krusial menyangkut ancaman terhadap kedaulatan teritorial Indonesia.<sup>12</sup> Berbagai upaya dilakukan negara-negara yang terlibat dalam konflik ini. Di antaranya adalah Filipina yang melayangkan Gugatan pada tahun 2013 kepada Mahkamah Arbitrase Internasional. Hasil pengadilan tersebut menyebutkan bahwa bahwa China tidak mempunyai dasar hukum apapun untuk mengklaim hak historisnya terhadap sumber daya laut yang terdapat pada '*Nine-Dash-Line*' di kawasan Laut China Selatan. Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag Belanda

---

<sup>11</sup> Tidwell, A. C. *Conflict Resolved?: A Critical Assessment of Conflict Resolution*. London and New York: Continuum. 1998. Hal. 3-8

<sup>12</sup> NBC Indonesia. (2015, 10 16). Klaim Wilayah Natuna, China Kerahkan Armada Tempur Besar-besaran. <http://www.nbcindonesia.com/2015/10/klaim-wilayah-natuna-china-kerahkan.html> (diakses 13 Desember 2017, puykul 19.00 WIB)

2017, klaim China tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan melanggar kedaulatan negara Filipina.<sup>13</sup>

Masalah konflik Indonesia dengan China terkait dengan masalah Laut China Selatan, Blok-Natuna merupakan konflik yang berkaitan dengan geopolitik, hukum internasional dan masalah kemaritiman. Semuanya bermuara pada kebijakan politik luar negeri Indonesia. Selama ini pemerintah Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif dengan dasar filosofis dari presiden pertama yaitu Soekarno. Pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo konsep filosofi Trisakti memperoleh legitimasi kembali dengan beberapa kebaruan, termasuk dalam konsep politik luar negeri. Latar belakang politik Jokowi baik dari ideologi pemikiran Bung Karno, maupun latar partai politik PDI Perjuangan ikut menjadi faktor pendukung kebijakan geopolitik Indonesia.

Politik luar negeri merupakan konsep dengan kebutuhan atau kepentingan dari setiap negara yang secara umum dapat dikatakan bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan suatu negara atau komunitas politik lainnya dalam hubungan dengan negara dan aktor bukan negara di dunia internasional. Politik luar negeri dapat juga sebagai jembatan batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Politik luar negeri wujudnya dapat berupa hubungan

---

<sup>13</sup> Asana, R., Suwartiningsih, S. and Nugroho, A.B.H., 2017. Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi. *Cakrawala*, 6(1), pp.35-58. Hal. 35.

diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>14</sup>

Kebijakan politik luar negeri Indonesia sangat penting dalam merespons konflik Blok-Natuna, baik dengan pendekatan militer (pertahanan keamanan) maupun diplomasi ataupun pendekatan yang lain misalnya hukum dan sosial ekonomi. Hal ini diantaranya dikarenakan dalam penelitian Ryan Muhammad menjelaskan bahwa skala ancaman yang dihadapi oleh Indonesia terkait isu klaim China atas perairan dan Kepulauan Natuna menunjukkan hasil nilai akhir yang berada pada nilai koefisien skala “sedang”. Kondisi ini berarti potensi ancaman yang dihadapi Indonesia terkait isu klaim China atas perairan dan Kepulauan Natuna tergolong sedang bagi Indonesia, dalam hal ini tidak tergolong tinggi dan tidak pula tergolong rendah.<sup>15</sup> Antisipasi dan kewaspadaan harus tetap ditingkatkan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia.

Besar kecilnya ancaman konflik bersenjata dalam konteks negara harus diantisipasi dengan segala kemungkinannya. Kebijakan dalam hal diplomasi juga perlu dipersiapkan karena banyak jalan menuju perdamaian regional melalui hukum internasional maupun diplomasi-diplomasi yang ada. Kebijakan diplomasi ekonomi menjadi hal yang menonjol pada masa

---

<sup>14</sup> Hara. A. E. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme*. . Bandung: Penerbit Nuansa. 2011. Hal. 15.

<sup>15</sup> Muhammad, Ryan. 2016. Analisis Ancaman Terhadap Isu Klaim China Atas Kepulauan Natuna Terkait Konflik Laut China Selatan Melalui Metode Analisis Intelijen “Hank Prunckun”. <https://lingstra.org/2016/04/analisis-ancaman-terhadap-isu-klaim-china-atas-kepulauan-natuna-terkait-konflik-laut-china-selatan-melalui-metode-analisis-intelijen-hank-prunckun/> (diakses 12 desember 2017, pukul 21.20 WIB)

kekuasaan Jokowi terkait dengan China, baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral melalui ASEAN. Kemudian bagaimana dengan kebijakan politik Indonesia dalam menghadapi konflik laut China selatan, terutama di Blok-Natuna. Kebijakan atau *policy* merupakan representasi dari politik atau rezim yang berkuasa. Sehingga kebijakan juga merujuk pada politik dalam arti luas, yaitu meliputi pada politik luar negeri Indonesia dalam menyikapi klaim Blok-Natuna sebagai wilayah China. Politik luar negeri tersebut kemudian diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti bidang maritim, pertahanan keamanan, ekonomi, hukum dan lain sebagainya. Kebijakan yang diambil dalam konteks ini tentu kebijakan yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa yaitu rezim Jokowi yang dimulai pada 2014 sampai 2019. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada kebijakan geopolitik, pertahanan dan keamanan, hukum dan diplomasi dan kebijakan kerja sama ekonomi yang dikeluarkan oleh rezim kekuasaan Jokowi yaitu 2014 sampai 2018.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dituliskan rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Indonesia dalam geopolitik, pertahanan dan keamanan, hukum dan diplomasi serta kerjasama ekonomi terhadap isu konflik Blok-Natuna di Laut China Selatan Tahun 2014-2018?

### **1.3. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dituliskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Indonesia dalam kebijakan geopolitik, pertahanan dan keamanan, hukum dan diplomasi serta kerja sama ekonomi terhadap isu Blok-Natuna di Laut China Selatan Tahun 2014-2018.

### **1.4. Kontribusi Riset**

#### **1. Kontribusi Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis bagi mahasiswa, dosen, peneliti terkait dengan isu konflik kawasan terutama konflik Laut China Selatan dalam perspektif politik Indonesia. Sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam penelitian terkait konflik Laut China Selatan di kemudian hari.

#### **2. Kontribusi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sejumlah pihak pemerintah Indonesia, negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan dan sekaligus bagi bangsa Indonesia terkait dengan posisi Indonesia dalam konflik Laut China Selatan beserta kebijakan politik yang dijalankannya. Dengan demikian akan didapatkan pemahaman yang sama sehingga setiap upaya yang dilakukan dapat sinergi antar kementerian. Masyarakat dapat memberikan dukungan secara baik ketika mengetahui politik

Indonesia dalam konflik Laut China Selatan, baik yang di Blok-Natuna maupun diseluruh Indonesia.

### **1.5. Originalitas Riset**

Penelitian ini merupakan riset murni penulis yang mengembangkan sejumlah penelitian – penelitian sebelumnya. Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu lebih terfokus Konflik Laut China Selatan pada Blok-Natuna. Fokus penelitian terdahulu lebih terfokus pada konflik Laut China Selatan secara umum. Fokus pada kebijakan politik Indonesia memberikan warna berbeda ketika rezim yang berkuasa juga berbeda, termasuk pendekatan, kebijakan, dan upaya yang dilakukan pada rezim Jokowi berbeda daripada rezim-rezim sebelumnya.

Fokus kajian penelitian terdahulu sebagian besar bersifat *unilateralisme* semata yang artinya konflik Laut China Selatan dipandang dari satu sudut pandang tertentu, diantaranya dengan pendekatan geopolitik saja, militer (pertahanan keamanan) saja dan diplomasi atau hukum internasional semata. Penelitian ini akan melihat politik Indonesia dalam konflik Laut China Selatan Blok-Natuna dalam perpektif yang sifatnya *multilateralisme*, yaitu peneliti akan melihat bukan hanya persoalan geopolitik semata, namun dikaitkan sebagai geo-ekonomi, pertahanan dan keamanan serta pendekatan hukum dan diplomasi antar negara. Penelitian ini sepanjang pengetahuan peneliti merupakan penelitian terbaru, baik fokus spesifiknya maupun pendekatannya. Apabila nanti terdapat penelitian yang sama, namun belum sempat penulis jadikan referensi, maka penelitian

ini sifatnya sebagai pelengkap serta pengembangan dari penelitian-penelitian tersebut.

### **1.6. Studi Pustaka (*Literature Review*)**

Penelitian terdahulu terkait hal-hal yang berhubungan dengan konflik Laut China Selatan dan masalah Geopolitik Indonesia telah banyak dilakukan, diantaranya adalah:

1. Asana, dkk., ( 2017) yang berjudul “*Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi*”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan yang diatur dalam UNCLOS 1982 menjadi dasar dari kepentingan Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan Doktrin Poros Maritim Dunia. Hasil penelitian menerangkan bahwa doktrin poros maritim dunia mempengaruhi komponen dalam negeri yakni norma, struktur, serta hubungan antara Indonesia dengan negara/pihak lain. Indonesia yang pada masa pemerintahan Jokowi menggunakan strategi pertahanan berbasis defensif aktif, mengutamakan upaya kerja sama terkait sengketa wilayah di pulau-pulau kecil terluar tanpa tindakan agresif. Strategi tersebut juga berarti bahwa sektor ekonomi diposisikan sebagai salah satu pendukung utama bahkan tujuan dari pertahanan, sehingga segala aktifitas pemerintahan harus mengarah pada kesejahteraan rakyat dan peningkatan ekonomi negara. Sehingga dalam kebijakan pertahanan dikenal dengan motto *defense support prosperity*. Pertahanan ditempatkan di pulau-pulau kecil terluar bukan saja untuk menjaga kedaulatan

negara melalui operasi militer, tetapi juga membantu menjaga keamanan terlaksananya kegiatan pemanfaatan sumber daya penunjang perekonomian.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini fokus pada pertahanan keamanan pulau-pulau kecil, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus konflik Laut China Selatan Blok-Natuna dan pertahanan keamanan hanya menjadi satu bagian dalam penelitian yang akan dilakukan.

2. Trihastuti, dkk., (2017) yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration*”. Penelitian ini bermula pada kasus Filipina yang melayangkan Gugatan kepada Mahkamah Arbitrase Internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian gugatan Filipina terhadap China terkait Laut China Selatan melalui *Permanent Court of Arbitration*. Hasil penelitian menyimpulkan gugatan Filipina terhadap China mengenai Laut China Selatan melalui *Permanent Court of Arbitration* (PCA), gugatan yang diajukan Filipina sudah benar dan tidak menyalahi aturan yang ada pada UNCLOS 1982 dan hal ini tidak menyinggung mengenai masalah kedaulatan negara. Putusan arbitrase ini tetap bersifat final dan mengikat meskipun China menyatakan tidak berpartisipasi dan tidak menerima putusan tersebut. Kedua pihak yaitu China dan Filipina harus tetap menghormati dan menjalankan putusan

---

<sup>16</sup> Asana, R., Suwartiningsih, S. and Nugroho, A.B.H., 2017. Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi. *Cakrawala*, 6(1), pp.35-58.

mahkamah arbitrase tersebut dengan dasar itikad baik menjaga perdamaian.<sup>17</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus kajiannya dan kasusnya. Pendekatan penelitian ini adalah hukum arbitrase international dengan studi kasus di Filipina. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan lebih kepada kebijakan Indonesia dalam konflik Laut China Selatan Bok-Natuna. Pendekatan hukum termasuk satu bagian dalam kebijakan tersebut.

3. Al-Attar, dkk., (2017) yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer Di Wilayah Sengketa Internasional (Studi Kasus Laut China Selatan)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum atas penempatan Militer di wilayah sengketa International. Hasil penelitian menjelaskan bahwa klaim China atas wilayah Laut China Selatan dinyatakan melanggar UNCLOS 1982 oleh putusan Arbitrase di Den Haag tanggal 12 Juli 2016 sehingga secara mutlak China sebenarnya tidak memiliki hak atau dasar yang kuat atas wilayah klaim Laut China Selatan yang dilakukannya. Untuk itu, segala aktifitas militer di wilayah sengketa oleh China harus dihentikan dan diperintahkan untuk segera menarik kekuatan militernya. Negara lainnya yang turut bersengketa diminta untuk menahan diri sesuai dengan *declaration of conduct* Laut China Selatan sampai tercapainya kesepakatan yang mampu mengikat semua negara yang

---

<sup>17</sup> Trihastuti, N., Susetyorini, P. and Hanifah, M., 2017. Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina Terhadap China Mengenai Laut China Selatan Melalui Permanent Court of Arbitration. *Diponegoro Law Review*, 6(1), pp.1-9.

bertikai.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus kajiannya dan kasusnya. Pendekatan penelitian ini adalah hukum internasional terkait penempatan militer pada wilayah sengketa dengan studi kasus konflik di Filipina dengan China. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan lebih kepada kebijakan Indonesia dalam konflik Laut China Selatan Bok-Natuna. Pendekatan hukum internasional termasuk satu bagian dalam kebijakan tersebut.

4. Haryanto (2015) hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Indonesia masih menggunakan pendekatan faktor geografis sebagai sumber dalam pembuatan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai usaha Indonesia yang secara terus-menerus berpartisipasi dalam berbagai isu-isu regional yang berpotensi mengganggu kedaulatan Indonesia, misalnya isu konflik di Laut China Selatan dan Laut Timur China. Indonesia selalu semangat dan gencar melakukan diplomasi perbatasan untuk mempertahankan perdamaian regional sekaligus territorialnya.<sup>19</sup> Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada pendekatan penelitiannya di mana penelitian ini menekankan faktor geografis dan konsepsi peran nasional sebagai sumber kebijakan. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan penekanan pada konsep kebijakan geopolitik secara luas dan

---

<sup>18</sup> Al-Attar, F.S., Warno, N.D. and Hardiwinoto, S., 2017. Tinjauan Yuridis Penempatan Kekuatan Militer Di Wilayah Sengketa Internasional (Studi Kasus Laut China Selatan). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), pp.1-13.

<sup>19</sup> Haryanto, A., 2015. Faktor Geografis dan Konsepsi Peran Nasional sebagai Sumber Politik Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), pp.136-147

pada doktrin poros maritim dunia. Sehingga penelitian lebih luas cakupan bidangnya, bukan hanya faktor geografis.

5. Fhatun, L.M (2016) yang meneliti tentang Kebijakan Poros Maritim Jokowi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan geopolitik poros maritim Jokowi ada 2 yaitu faktor intepretasi ideologis dan faktor struktur geopolitik terhadap ancaman keamanan maritim Indonesia. Faktor interpretasi ideologis berkaitan dengan proses perumusan kebijakan dipengaruhi oleh ideologis partai politik, elit politik dan tim sukses. Paradigma ideologis Soekarno berupa nilai-nilai Pancasila serta konsep Trisakti yang keduanya melahirkan visi dan misi Jokowi yang di bentuk dalam agenda Nawacita. Faktor struktur geopolitik terkait ancaman keamanan maritim Indonesia karena berbatasan dengan 10 negara Asia Pasifik serta tumpuan dua Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan Indonesia rawan akan keamanan maritim tradisional dan non tradisional. Isu keamanan tradisional yang ada terkait sengketa batas wilayah laut dengan 10 negara dan 8 titik sengketa yang belum dapat diselesaikan. Isu ancaman non tradisional berkaitan dengan ancaman *maritime terrorism*, *illegal fishing*, *illegal arms* dan *illegal drugs* serta aksi perompak.<sup>20</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah jika penelitian ini lebih fokus terhadap faktor kebijakan geopolitik, maka penelitian yang dilakukan penulis adalah 4 bidang kebijakan dalam

---

<sup>20</sup>Fathun, L. M. (2018). Kebijakan Geopolitik Poros Maritim Di Era Jokowi Dalam filosofi Frame Ideologis. *Jurnal Power in International Relations (PIR)*, 1(2), 135-152.

melihat konflik Laut China Selatan yaitu geopolitik, pertahanan keamanan, hukum dan diplomasi serta diplomasi ekonomi.

6. Shabrina (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa respons dan kebijakan terhadap klaim sepihak dari China ini direspon secara berbeda oleh pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono dan Pemerintahan Joko Widodo. Dalam penelitian ditemukan perbedaan tersebut adalah Soesilo Bambang Yudoyono respons dan kebijakannya cenderung datar, mendorong upaya-upaya perdamaian kawasan dengan perundingan-perundingan dan kerja sama internasional. Sedangkan pemerintahan Jokowi lebih tegas dengan mempersiapkan antisipasi pertahanan keamanan, kemaritiman serta tetap mengusahakan diplomasi-diplomasi langsung maupun tidak langsung.<sup>21</sup> Perbedaannya dengan penelitian ini adalah jika penelitian ini membandingkan kebijakan SBY dengan Jokowi, maka penelitian ini akan lebih fokus pada kebijakan Indonesia pada jaman Jokowi saja. Meskipun demikian kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan luar negeri dalam arti luas yang mencakup berbagai bidang.
7. Penelitian lain dilakukan Wuryandari, (2011) yang menyimpulkan bahwa kebijakan dan strategi pertahanan Indonesia pada pemerintahan SBY masih menganggap bahwa konflik di Laut China Selatan dapat diselesaikan melalui *soft power* dan tidak mengantisipasi penggunaan *hard power*

---

<sup>21</sup> Shabrina, N.O., 2017. Perubahan Respon Indonesia Terhadap Klaim Nine-Dash Line China Yang Melewati Perairan Natuna. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), pp.133-146.

karena akan berimplikasi terhadap kepentingan nasional Indonesia.<sup>22</sup> Meskipun dalam perkembangannya rezim pemerintahan berikutnya mulai memikirkan penguatan pertahanan keamanan di wilayah Laut China Selatan, terutama Blok-Natuna. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada pendekatannya. Jika penelitian ini lebih menekankan pada strategi pertahanan keamanan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan melihat kebijakan dari berbagai bidang, termasuk pertahanan keamanan sebagai bagian.

Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar atas apa yang telah diupayakan dalam menjaga perdamaian kawasan terkait konflik Laut China Selatan. Juga telah mengetahui respons dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dari masa ke masa dan dari sudut pandang berbagai bidang. Penelitian ini akan berangkat dalam sudut pandang politik Indonesia secara umum dalam menghadapi konflik Laut China Selatan. Kebijakan politik yang dimaksud meliputi kebijakan politik luar negeri Indonesia yang melahirkan berbagai pendekatan dalam penyelesaian Konflik Laut China Selatan Blok-Natuna.

---

<sup>22</sup> Prabowo, E.E., 2013. Kebijakan Dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Di Laut China Selatan). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(3), pp.118-129.

## 1.7. Kerangka Teoritik

### 1.7.1. Politik Luar Negeri

Politik Indonesia dalam konflik Laut China Selatan berangkat dari politik luar negeri pemerintah, yang tentu mengalami dinamisasi sesuai dengan pemerintahan yang sedang berkuasa. Politik bagi suatu negara adalah lanjutan dan refleksi dari politik dalam negeri. Kebijakan politik luar negeri sebagai cerminan politik dalam negeri, sehingga apabila politik domestiknya tidak ada arah yang jelas dan banyak mengandung ketidakpastian di tingkat nasional, akan sulit merefleksikan pada tingkat internasional.<sup>23</sup> Hal ini berarti antara politik dalam negeri dengan luar negeri sangat erat kaitannya. Ciri kas rezim yang berkuasa juga menjadi cerminan politik luar negeri yang diterapkan, termasuk politik dalam menghadapi konflik di Laut China Selatan.

Politik luar negeri suatu negara selalu mengandung dua unsur yang saling berinteraksi, yaitu unsur keajegan atau tetap dan unsur yang berubah. Unsur tetap biasanya terdiri dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat di negara itu serta prinsip-prinsip bernegara yang telah disepakati sejak awal pembentukan negara, sementara unsur perubahan lebih menyangkut pada persoalan yang bersifat strategis, prioritas dan cara-cara memperjuangkan kepentingan nasionalnya.<sup>24</sup> Unsur tetap dalam konteks Indonesia, politik luar negeri mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila yang

---

<sup>23</sup> Wuryandari, G. (ed). 2011. *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar

<sup>24</sup> Sriyono, A. (ed). *Politik Luar Negeri Indonesia dalam zaman yang Berubah, Hubungan Internasional: Percikan Pemikiran Diplomat Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2004.

dipilih karena sila-silanya (5 sila) merupakan pedoman hidup dan aturan bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa bernegara yang ideal dan mencakup segala aspek kehidupan manusia. Landasan operasional yang selalu berubah menyesuaikan kepentingan nasional. Politik internasional bebas aktif dalam arti tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain dan bersedia melakukan kerja sama dengan semua negara dibidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Politik luar negeri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan kebijakan yang mempunyai peran dan pengaruh dalam hubungan suatu negara atau pemerintah dengan negara (pemerintah) lainnya sebagai tanggapan terhadap kejadian dan masalah dunia internasional. Atau dengan kata lain, politik luar negeri adalah sintesa perwujudan tujuan dan kemampuan (kapabilitas) nasional.<sup>26</sup> Sehingga meskipun mempunyai unsur tetap, namun ketika unsur perubahan secara operasional dapat berbeda setiap rezim kekuasaan.

William D. Coplin mengidentifikasi ada 4 determinan atau indikator dari politik luar negeri, yaitu konteks internasional, perilaku para pengambil keputusan, kondisi ekonomi dan militer, dan politik dalam negeri. Konteks internasional meliputi geografi, ekonomi, dan politik. Perilaku pengambil keputusan meliputi pihak eksekutif, kementerian dan lembaga negara di suatu pemerintahan. Kekuatan militer serta kekuatan ekonomi negara

---

<sup>25</sup> Alami, Atiqah Nur. Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia” dalam Ganewati Wuryandari (ed.). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar. 2008.

<sup>26</sup> Rudy. T. M. *Teori, Etika, dan Kebijakan Hubungan Internasional*. Bandung: Angkasa. 1993.

tertentu dapat mempengaruhi interaksi negara tersebut dengan negara lain. Politik dalam negeri yang meliputi sistem pemerintahan atau birokrasi yang dibangun dalam suatu pemerintahan serta pengaruhnya terhadap perpolitikan nasional dan internasional.<sup>27</sup>

Politik luar negeri Indonesia terkait dengan konflik Laut China Selatan secara ideologi tetap pada Pancasila sebagai dasar negara dengan tidak mencampuri urusan negara lain dan selalu mengembangkan kersa sama di segala bidang serta berperan aktif dalam perdamaian internasional. Berdasarkan konteks determinan kebijakan luar negeri Indonesia, kebijakan lebih cenderung menyesuaikan antara konteks nasional dengan internasional, konteks pengambil keputusan atau pimpinan, kerja sama dalam ekonomi, sosial dan politik serta keamanan internasional. Kemudian kebijakan luar negeri pada rezim Presiden Joko Widodo diwujudkan dalam kebijakan geopolitik dengan konsep “Poros Maritim Dunia”, kebijakan pertahanan dan keamanan diwujudkan pada peningkatan anggaran dan alutsista untuk tujuan pengawasan dan menjaga perdamaian, kebijakan hukum dan diplomasi dilakukan untuk menjaga perdamaian regional dan internasional dalam berbagai forum internasional, dan kebijakan ekonomi dilakukan dengan peningkatan kerja sama ekonomi antar negara-negara di wilayah konflik serta antara ASEAN dengan China.

---

<sup>27</sup> Coplin. William D. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru. 1992.

### 1.7.2. Model Analisis Politik Luar Negeri

Politik luar negeri dapat dianalisis berdasarkan model yang telah ditentukan oleh banyak ahli politik luar negeri. Model analisis politik luar negeri dalam perkembangannya terdiri dari 5 model analisis, yaitu: Model Strategik / Model Rasional (*Strategic/Rational Model*); Model Pembuatan Keputusan (*The Decision-Making Model*); Model Politik Birokrasi (*The Bureaucratic Politics Model*); Model Adaptif (*The Adaptive Model*) dan Model Incremental (*Incremental Decision-Making*).<sup>28</sup>

Model strategik atau model rasional mempunyai asumsi dasar bahwa negara-negara dapat dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan mereka berdasarkan kalkulasi rasional di dalam kancah politik global. Fokus perhatian dalam model ini adalah lebih menekankan pada transaksi atau interaksi antar pihak-pihak (negara-negara) yang terlibat. Model ini biasanya digunakan para analis untuk menilai perhitungan rasional dari suatu negara dalam merespons negara lain dalam berbagai isu yang menyangkut kepentingannya atau kepentingan tertentu.<sup>29</sup>

Model pembuatan keputusan mempunyai asumsi dasar bahwa tindakan internasional merupakan sekumpulan keputusan-keputusan yang dibuat oleh unit-unit politik dalam negeri, yaitu para pemimpin negara (baik individual maupun

---

<sup>28</sup> Yanyan Mochamad Yani. Sistem Politik Luar Negeri. Disampaikan pada ceramah bagi Perwira Siswa Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-45 TP 2008, Bandung, 14 Mei 2008.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 1-3.

berkelompok) yang bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan negara. Karakteristik dari model ini adalah apapun faktor yang menjadi determinan dari suatu kebijakan luar negeri tetap akan dipertimbangkan oleh para pimpinan atau pembuat keputusan (*decision-makers*). Kelebihan model ini adalah dimensi manusia dianggap lebih efektif dari proses politik luar negeri itu sendiri.<sup>30</sup>

Model politik birokrasi memberikan penekanan utamanya pada analisis jaringan birokrasi organisasi yang kompleks dengan prosedur-prosedur kelebagaannya. Model ini menekankan pada peranan yang dilakukan oleh birokrat yang terlibat dalam proses politik luar negeri, sehingga para birokrat memiliki banyak pengaruh dalam merumuskan politik luar negeri. Birokrat mempunyai tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan yang sebelumnya telah ditetapkan sehingga dimungkinkan birokrat akan mempengaruhi atau ikut campur dalam implementasinya. Pada konteks ini birokrat adalah pemerintah yang terdiri dari individu dan organisasi. Konsekuensinya keputusan tidak dipandang sebagai produk rasionalitas, namun hasil produk dari proses interaksi dan penyesuaian dari berbagai individu dalam organisasi. Politik luar negeri merupakan hasil dari proses politik yang meliputi perundingan (*bargaining*), kompromi (*compromise*), dan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*).<sup>31</sup>

Model Adaptif (*The Adaptive Model*) merupakan model yang berupaya memisahkan berbagai pilihan politik luar negeri

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 4

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 6

yang didasarkan atas perhitungan kapabilitas yang dimiliki negara dan posisi geopolitiknya. Fokus model ini adalah bagaimana negara-negara memberikan respons terhadap kendala-kendala dan kesempatan-kesempatan yang diciptakan oleh lingkungannya masing-masing. Model ini menekankan karakteristik lingkungan tertentu akan menyebabkan akibat yang khusus, tidak terikat atau tergantung dengan tindakan dan pilihan politik apapun. Model ini memandang semua negara-bangsa dapat sebagai suatu entitas yang selalu melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Oleh karena itu pusat perhatian analisis ini tertumpu pada proses adaptasi suatu negara akibat respon terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal, tergantung dari kemampuan yang dimiliki serta letak geografis serta hal lainnya.<sup>32</sup>

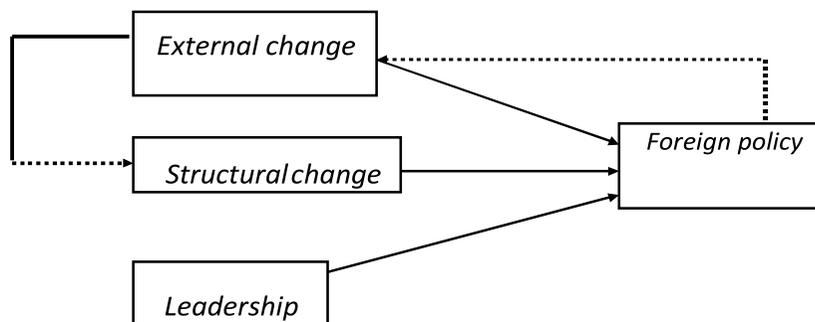
Model *Incremental* memandang keputusan-keputusan politik luar negeri yang muncul sebagai proses *incremental* atau penambahan-penambahan. Adanya ketidakpastian (*uncertainty*) serta informasi yang kurang lengkap untuk menjawab tantangan dari luar akan mengakibatkan keputusan yang diambil tidak dapat berdasarkan rasional semata dan secara menyeluruh. Oleh karena itu para pembuat keputusan tidak mempertimbangkan semua pilihan politik luar negeri, namun pilihan yang diambil sering bukan didasarkan pada apa yang paling baik untuk memecahkan masalah secara rasional, tetapi atas dasar pilihan yang dipilih dan disetujui oleh para pembuat keputusan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid., hal. 6-7

<sup>33</sup> Ibid., hal. 10.

Model analisis politik luar negeri di atas terdiri dari 5 model, namun dalam penelitian ini, model yang digunakan adalah model adaptif yang dirumuskan oleh James N. Rosenau. Model ini dianggap sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia yang mengakomodasi kepentingan internal atau struktural, kepentingan eksternal serta pengaruh dari kepemimpinan. Secara sederhana, model tersebut digambarkan:



Gambar 1.2. Model Adaptif Politik Luar Negeri

Sumber: James N. Rosenau, *Comparing Foreign Policy: Theories, Findings, and Methods*. New York: Sage Publications, 1974, hal. 47.

Politik luar negeri berdasarkan model adaptif memandang merupakan bagian dari konsekuensi karena adanya perubahan struktur baik internal maupun eksternal. Penjumlahan dari variabel independen antara perubahan internal dan eksternal menghasilkan tindakan politik luar negeri. Namun pada perkembangannya, model ini menambahkan variabel kepemimpinan (*leadership*), sehingga dapat dituliskan persamaannya di halaman selanjutnya, sebagai berikut:

$$Pt = Lt + Et + St$$

Keterangan:

Pt = politik luar negeri pada saat tertentu

Lt = aspek kepemimpinan (*leadership*) elite politik negara dalam waktu tertentu

Et = perubahan eksternal

St = perubahan struktural (internal)

Rosenau menyatakan bahwa politik luar negeri merupakan suatu mekanisme bagi negara-negara untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di lingkungan internal maupun eksternal. Hal ini dalam upaya untuk bertahan hidup dan mencapai tujuan nasional, sehingga harus menyeimbangkan tekanan internal dengan tuntutan eksternal. Rosenau memunculkan empat kemungkinan pola adaptasi politik luar negeri dari suatu negara sebagai respon atas hambatan-hambatan dari lingkungan domestik dan internasional yang dihadapi oleh para pembuat keputusan. Pola adaptif tersebut terdiri dari *preservative adaptation* (respon perubahan interna dan eksternal), *acquiescent adaptation* (respon terhadap perubahan eksternal), *intransigent adaptation* (respon terhadap perubahan internal), *promotive adaptation* (tidak respon terhadap perubahan internal maupun eksternal), masing-masing pola adaptasi politik luar negeri ini mempunyai implikasi yang berbeda-beda bagi perubahan dan kesinambungan politik luar negeri suatu negara.

### **1.7.3. Politik Luar Negeri Rezim Joko Widodo**

Rezim yang saat ini berkuasa adalah pemerintahan Joko Widodo, politik luar negerinya masih berprinsip pada politik luar negeri bebas dan aktif berdasarkan filosofi Trisakti Bung Karno (berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara sosial budaya) dalam konteks saat ini. Politik luar negeri pemerintahan Joko Widodo dapat dilihat dari rumusan Renstra Kemenlu 2015-2019. Politik luar negeri RI akan dititikberatkan pada identitas sebagai negara kepulauan dalam diplomasi dan kerja sama internasional. Penguatan diplomasi middle power dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan global dengan aktif serta memperluas ketertiban regional kawasan Indo Pasifik. Presiden Joko Widodo telah memunculkan konsep kebijakan politik luar negeri yang baru yaitu poros maritim dunia (2014), melakukan deklarasi kerja sama antar negara-negara maritim (2014), peran aktif Indonesia dalam anggota G-20 serta melakukan evaluasi para perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri. Peningkatan peran dan aspirasi serta kepentingan masyarakat dalam perumusan kebijakan luar negeri juga pelaksanaannya, termasuk dalam hal infrastruktur diplomasi telah dilakukan. Politik luar negeri Indonesia ditempatkan dalam integrasi dengan kementerian yang terkait dengan perdagangan, maritim, dan investasi. Munculnya konsep diplomasi ekonomi merupakan perwujudan politik luar negeri Indonesia dengan orientasi yang baru, yaitu sebuah terminologi baru yang muncul dan berkembang melalui perjalanan panjang diplomasi yang

sebelumnya didominasi dengan isu-isu keamanan dan politik luar negeri.<sup>34</sup>

Doktrin poros maritim dunia dalam Renstra Kemenlu terdiri dari Lima pilar utama, yaitu: a) membangun kembali budaya maritim Indonesia; b) Nelayan harus menjadi pilar utama dalam menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut; c) Pembangunan infrastruktur maritim dan konektivitas harus menjadi prioritas, diantaranya membangun tol laut, logistik, *deep seaport*, industri perkapalan nasional, serta wisata berbasis maritim; d) menerapkan diplomasi maritim dengan cara peningkatan kerja sama maritim serta berupaya menangani sumber konflik yang ada, seperti pencurian ikan, sengketa wilayah, pelanggaran kedaulatan, perompakan, dan pencemaran laut dengan paradigma laut harus dapat menyatukan berbagai bangsa dan negara lain, bukan sebagai pemisah; e) membangun kekuatan maritim yang merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.<sup>35</sup>

Berdasarkan politik luar negeri pada pemerintahan Jokowi yang sedang berjalan, dengan doktrin poros maritim dunia, maka dapat dilihat bahwa pemerintahan Jokowi mempunyai paling tidak 4 pendekatan dalam mengelola konflik di Laut China Selatan Blok-Natuna, yaitu pendekatan geopolitik, pendekatan pertahanan dan keamanan, pendekatan hukum dan diplomasi, dan pendekatan kerja sama ekonomi.

---

<sup>34</sup> Haryono, E. 17 – 10-2017. *Politik luar negeri tiga tahun pemerintahan Jokowi*. <http://mediaindonesia.com/news/read/127568/politik-luar-negeri-tiga-tahun-pemerintahan-jokowi/2017-10-17> (diakses 12 Desember 2017, Pukul 19.00 WIB)

<sup>35</sup> Kemenlu. Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri tahun 2014 – 2019.

#### 1.7.4. Geopolitik

Geopolitik mempelajari bagaimana keputusan politik dapat diambil secara tepat dan strategis dengan mempertimbangkan faktor geografis. Geografis dalam hal ini mengacu pada batas-batas geografis antar negara yang juga berarti batas politis. Geopolitik merupakan daerah irisan antara *political science* dengan *political geography* sehingga geopolitik atau dalam konteks lain hubungan antara geografi dan politik sering juga disebut *human geography* yang prinsipnya menyangkut hubungan antara *political behavior* dan *psycal features*. Artinya erat hubungan antara perilaku politik negara dan lingkungan geografinya.<sup>36</sup> Griffith menyatakan bahwa Geopolitik merupakan studi tentang pengaruh faktor geografis pada perilaku negara, seperti bagaimana lokasi, iklim, sumber daya alam, populasi, dan medan fisik menentukan pilihan kebijakan luar negeri negara dan posisinya dalam hierarki negara.<sup>37</sup>

Ilmu geopolitik pada dasarnya merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala potensi yang dimiliki oleh suatu bangsa atas dasar jati-dirinya yang merupakan suatu kekuatan dan kemampuan dalam mempertahankan ketahanan nasional. Dalam konteks Indonesia, geopolitik mengajarkan untuk memelihara persatuan bangsa dan keutuhan NKRI berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika yaitu kesetaraan, keadilan, kebersamaan

---

<sup>36</sup> Makmur Keliat. Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol 13, No.1 Juli 2009, h.113.

<sup>37</sup> Griffiths, M. dan Terry O'Callghan, *International Relations: the key concepts*, Routledge: New York. 2002, hlm.120

serta kepentingan nasional.<sup>38</sup> Hal ini berarti bahwa geopolitik merupakan ajaran dasar untuk tetap menjaga kesatuan wilayah NKRI baik dalam artian wilayah fisik maupun wilayah ideologi berbagas dan bernegara.

Geopolitik secara bahasa berasal dari Yunani, yaitu *geo* berarti bumi tempat kehidupan dan politik berasal dari kata *polis* yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan *teia* yang mempunyai arti urusan politik atau kepentingan umum dari warga suatu negara.<sup>39</sup> Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu tentang penyelenggaraan negara yang dalam pengambilan setiap kebijakannya berkaitan dengan masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu negara beserta urusan kewarganegaraannya.

Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kekuatan politik dan ruang geografis. Terminologi ini merupakan formulasi khusus yang berhubungan antara kepentingan strategis relatif dengan pentingnya potensi geografis dalam perspektif dunia internasional. Fokus utama teori geopolitik berhubungan dengan korelasi antara kekuatan dalam bidang politik, unsur wilayah geografis inti dari perspektif internasional, dan hubungan antara kapabilitas laut dan darat yang dimiliki oleh suatu negara. Pendekatan geopolitik dapat digunakan untuk menganalisis kebutuhan terkait kebijakan luar negerinya baik dalam konteks kerja sama ataupun penyelesaian hubungan

---

<sup>38</sup> Suradinata, E. (2001). Geopolitik Dan Geostrategi Dalam Mewujudkan Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 6(2001). Pp 79-97.

<sup>39</sup> Sunarso. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press. 2006. Hlm. 195.

konflikual. Geopolitik merupakan peta bagi negara untuk bermain dalam politik internasional baik dalam skala lokal, regional maupun global.

Geopolitik merupakan suatu ajaran yang sistematis tentang sifat-sifat geografi sebuah negara sebagai faktor yang paling prinsipil untuk menentukan politik pemerintah suatu negara terutama dalam bidang urusan luar negeri untuk memelihara keamanan nasional. Penggolongan teori geopolitik menurut Suwondo dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut De Huszar & Stevenson dan menurut Bertil Haggman.<sup>40</sup> Menurut De Huszar dan Stevenson Geopolitik diklasifikasikan menjadi tiga kategori antara lain:

1. Berdasarkan kondisi geografi tata letak dari daratan dan laut. Teori ini berbeda dengan Mahan yang menekankan pada interpretasi *sea power* yaitu menguasai laut merupakan kunci utama menguasai dunia, sedangkan teori ini yang diusung Mackinder memandang berdasarkan teori *Heartlandnya* atau tata letak dari daratan dan lautan.
2. Berdasarkan iklim dalam ruang dan waktu. Teori ini memandang bahwa dampak dari iklim terhadap kehidupan manusia karena iklim berdampak pada kebiasaan kehidupan manusia. Huntington (1876-1947) berargumentasi bahwa pengaruh dari beberapa variable perubahan iklim dapat mempengaruhi perilaku dan kapasitas dari *human being* atau perilaku kelangsungan hidup manusia. Kondisi iklim yang

---

<sup>40</sup> Letjen TNI (Purn) Purbo S. Suwondo. *Pertimbangan-pertimbangan teoritik dan konseptual yang penting untuk perencanaan strategis*. Jakarta 27 September 2007.

baik akan membuat seseorang atau suatu negara bertahan dari pada saat musim dingin khususnya ketika berperang.

3. Berdasarkan sumber akses ekonomi suatu negara dalam bentuk sumber daya alam berupa sumber mineral minyak dan sumber energi lainnya. Teori ini menjelaskan bahwa lokasi dan distribusi dari material atau bahan baku yang berasal dari alam telah mempengaruhi kelancaran suatu sistem dari suatu kondisi geopolitik negara tertentu. Hipotesis yang dibangun bahwa kekuatan politik atau geopolitik modern dari suatu negara dipengaruhi oleh sumber daya alam antara lain minyak baik dari fosil maupun non fosil serta kemampuan mengembangkan teknologi.

Bertil Haggman mengelompokkan teori geopolitik menjadi dua, yaitu: geopolitik klasik dan geopolitik modern. Geopolitik klasik bersumber dari teori Ratzel (Jerman), Rudolf Kjellen (Swedia), Karl-Houshofer (Jerman), Mackinder (Inggris), Mahan dan Nicholas Spykman (Amerika). Sedangkan Geopolitik Modern tokohnya adalah Colin S.Gray (Inggris) dengan bukunya '*Geopolitics of the Nuclear Era*' yang beranggapan bahwa geopolitik sudah ketinggalan jaman yang digantikan dengan geopolitik ekonomi.

1. Geopolitik Klasik, memandang bahwa setiap negara mempunyai konsep tentang ruang atau wilayah yang dimilikinya dan sifatnya terbatas. Negara memerlukan tambahan ruang untuk melaksanakan pemerintahannya dalam rangka mencukupi kebutuhan masyarakatnya, maka ruang mempengaruhi secara signifikan pada dunia politik.

2. Geopolitik Modern, memandang dengan sumber daya alam yang besar dan pengaruh teknologi yang baik dalam berbagai bidang akan dapat menguasai dunia. Dengan teknologi bahan baku fosil dapat digantikan dengan bahan baku nabati, sehingga manusia tidak tergantung pada bahan yang tidak terbarukan. Teknologi dapat mendukung kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara, sedangkan sumber daya alam tanpa teknologi akan sulit dimanfaatkan secara optimal oleh suatu negara. Maka pertemuan sumber daya alam dengan teknologi yang maju merupakan inti dari geopolitik modern.

Kebijakan geopolitik terkait dengan teori geopolitik klasik tentang konsep ruang, negara dapat dilihat dari geopolitik maritim karena terkait dengan ruang kelautannya. Kebijakan geopolitik dengan ruang maritim (laut) mempunyai filosofi bahwa negara memahami tentang kondisi kekuatan morfologi negara sebagai *power politic* yang bersumber dari wilayah maritim sebagai kekuatan yang potensial selain aspek kekuatan daratan. Pemikir teori geopolitik maritim seperti Ratzel, menekankan pendekatan bahwa negara membutuhkan ruang untuk hidup dan harus menjaga ruang tersebut agar tetap di kuasai dan berpotensi dikembangkan. Dasar filosofi ini menjadi acuan bahwa wilayah Indonesia yang strategis sebagai negara pulau, diharapkan dapat menjaga wilayahnya dalam arti geopolitik maritim. Filosofi teori maritim Ratzel menemukan bahwa faktor geografi sebagai lingkungan akan berpengaruh kuat pada proses pengambilan kebijakan negara atau *the state political power*. Maka efek dari letak geografi sebagai wilayah maritim ( bentuk wilayah kelautan,

luas laut, sumberdaya alam dalam laut, sumberdaya manusai, letak laut) menjadi bagian dalam mempertahankan keberlangsungan negaranya. Ratzel memprediksi suatu saat dunia akan didominasi negara berciri maritim sebagai kekuatan dimasa yang akan datang.<sup>41</sup>

Berdasarkan teori geopolitik dapat dilihat visi ke depan tentang sesuatu aktifitas yang menyangkut dengan kepentingan nasional dan hubungannya dengan dunia luar. Doktrin Poros Maritim Dunia itu sendiri termasuk dalam pendekatan geopolitik pemerintahan Jokowi untuk mewujudkan visi ke depan Indonesia baik untuk kepentingan ke dalam maupun ke luar.

#### **1.7.5. Pertahanan dan Keamanan**

Pendekatan pertahanan dan keamanan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendekatan kekuatan militer yang digunakan untuk menjaga kedaulatan negara, termasuk teritorial maritim. Dalam konteks konflik Laut China Selatan Blok-Natuna, pendekatan militer bukan merupakan pendekatan utama namun merupakan langkah antisipasi yang disiapkan untuk kondisi-kondisi yang diperlukan. Teori yang relevan dengan pembahasan masalah pertahanan dan keamanan adalah teori strategi keamanan. Strategi dirancang berdasarkan pada rasionalitas para pembuat keputusan, bukan pada pertimbangan moral, keyakinan atau hal-hal emosional lainnya. Berpedoman strategi para pembuat kebijakan

---

<sup>41</sup> Hayati, Sri dan Ahmad Yani, *Geografi Politik*, Bandung: Refika Aditama, 2007. Hlm 10-12.

dalam usaha mencapai kepentingan nasional dan mencegah timbulnya masalah dan hambatan atas kepentingan tersebut.<sup>42</sup>

Konsep keamanan dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri (*survival*) dalam menghadapi ancaman yang nyata (*existential threat*). Keberlangsungan hidup suatu negara adalah bagaimana memproteksi dan memproyeksikan kedaulatan wilayah dan bagaimana mengembangkan serta mempertahankan identitasnya sebagai suatu bangsa.<sup>43</sup> Berdasarkan politik luar negeri bebas dan aktif dengan doktrin poros maritim dunia, Indonesia harus mampu menghadapi konflik yang terjadi di Laut China Selatan dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip politik luar negeri yang dianut.<sup>44</sup> Pertahanan dan keamanan yang dimaksud dalam konteks konflik Laut China Selatan adalah terkait dengan ketersediaan alutsista, personil, pangkalan militer, strategi dan kebijakan pendanaan.

Tujuan pendekatan pertahanan dan keamanan adalah tercapainya *sea power*, sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Mahan, seorang laksamana terkemuka Angkatan Laut Amerika Serikat (AS). Mahan mendeskripsikan *sea power* sebagai kemampuan negara untuk melindungi kepentingan politik, ekonomi, dan militernya dengan menggunakan laut. Empat prinsip yang terkandung di dalam *sea power* yaitu *naval power*, *ocean*

---

<sup>42</sup> Mochtar Mas'ood.. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat antar Universitas-Studi Sosial UGM. 1989, hlm, 90.

<sup>43</sup> Barry Buzan, *Security: A New Framework for Analysis* dalam Wuryandari, G. *Keamanan di Perbatasan Indonesia–Timur Leste, Sumber Ancaman & Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009. hlm.27

<sup>44</sup> Genewati W. *Ibid.*, hlm 30.

*science, ocean industry, and ocean commerce*. Menurut Corbett, *sea power* bukan hanya membahas tentang apa yang bisa negara lakukan di laut, tetapi juga mencakup efektifitas tindakan suatu negara di laut dan dapat memberikan dampak baik bagi aspek daratan.<sup>45</sup>

#### **1.7.6. Hukum dan Diplomasi**

Pendekatan hukum dan diplomasi merupakan pendekatan yang mengedepankan pemahaman hukum-hukum internasional yang mendasari hubungan kerja sama, wilayah perbatasan dan upaya perdamaian. Diplomasi dapat diartikan sebagai suatu relasi atau hubungan, komunikasi dan keterkaitan. Selain itu diplomasi juga dikatakan sebagai proses interaktif dua arah antara dua negara yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan politik luar negeri masing-masing negara. Diplomasi menjadi bagian yang sangat penting dalam mencari solusi untuk menyelesaikan konflik secara damai, bukan kekerasan atau perang. Diplomasi harus dilakukan oleh negara yang berkonflik dalam rangka untuk melindungi dan mencapai tujuan kepentingan nasional suatu negara yang berkonflik. Pada intinya diplomasi merupakan dengan aktifitas-aktifitas untuk menuju kedamaian, namun dapat juga memicu situasi perang atau konflik bersenjata. Oleh karena itu tugas utama diplomasi bukan hanya masalah manajemen konflik, tetapi termasuk manajemen perubahan serta bagaimana cara memeliharanya diantaranya dengan persuasi yang dilakukan

---

<sup>45</sup> Till, Geoffrey. 2004. *Seapower: A Guide for Twenty-First Century*. New York: Routledge.

secara masif di tengah-tengah perubahan yang sedang berlangsung.<sup>46</sup> Diplomasi dalam konteks konflik Laut China Selatan dapat dilakukan terhadap sesama negara ASEAN maupun dengan negara-negara di luar ASEAN. Bahkan diforum-forum internasional lain yang dapat membantu terbentuknya perdamaian regional. Diplomasi dibangun diantaranya dengan membangun hubungan bilateral dan multilateral.

#### **1.7.7. Kerja Sama Ekonomi (Geo-ekonomi)**

Pendekatan kerja sama ekonomi merupakan pendekatan pembangunan perekonomian bersama dengan prinsip yang saling menguntungkan. Pendekatan ekonomi diharapkan dapat mencairkan ketegangan regional. Pendekatan penyelesaian konflik dengan paradigma pembangunan kerja sama ekonomi merupakan paradigma baru, karena selama ini seringkali dilakukan dengan pendekatan politik dan keamanan serta diplomasi. Kerja sama ekonomi yang dimaksud juga melibatkan masyarakat dalam negeri termasuk diwilayah yang rawan terjadi konflik. Pendekatan ini merupakan pendekatan untuk mewujudkan geo-ekonomi di wilayah Indonesia, terutama di daerah perbatasan serta daerah konflik.

Geo-ekonomi adalah ilmu yang mempelajari variasi berbagai lingkungan permukaan bumi dan kegiatan manusia dalam bidang produksi, distribusi dan konsumsi diberbagai bentuk sistem wilayah dan daerah.<sup>47</sup> Geo-ekonomi merupakan cabang geografi manusia yang bidang studinya terdiri dari struktur

---

<sup>46</sup> S.L , Roy. *Diplomasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 1995, hlm. 35.

<sup>47</sup> Irfan Hadjam. *Geografi Ekonomi*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta. 1997. Hal. 5

keruangan aktifitas ekonomi, titik berat studinya adalah aspek keruangan struktur ekonomi manusia yang termasuk kedalamnya bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, komunikasi dan lain sebagainya.<sup>48</sup> Asumsi dasar dari pendekatan ini bahwa kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan saling ketergantungan dapat membuat antar negara semakin akrab dan menghindari terjadinya konflik. Meskipun telah terjadi sengketa atau pertentangan, maka masing-masing pihak dapat menahan diri untuk tidak saling memanaskan situasi sehingga akan mengancam keberlangsungan ketergantungan ekonomi serta kerja sama yang menguntungkan.

## **1.8. Hipotesa**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dituliskan hipotesis penelitian sebagai berikut: Kebijakan Indonesia terhadap isu konflik Blok-Natuna di Laut China Selatan pada tahun 2014-2018 dilakukan dengan 4 pendekatan, yaitu geo-politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan diplomasi, serta kerja sama ekonomi.

## **1.9. Metodologi Penelitian**

### **1.9.1. Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Salim mengatakan bahwa konsep penelitian kualitatif sebenarnya menunjuk dan menekankan pada proses, dan berarti tidak diteliti secara ketat

---

<sup>48</sup> Nursid Sumaatmadja. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni. 1981, hal. 54.

atau terukur (jika memang dapat diukur), dilihat dari kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada kondisi yang sifatnya realitas yang dibentuk secara sosial, hubungan yang dekat antara peneliti dengan yang subyek yang diteliti dan adanya kendala situasional yang membuat dilakukannya penyelidikan.<sup>49</sup>

Tujuan dari penelitian kualitatif tidak selalu mencari hubungan sebab akibat, tetapi lebih kepada upaya untuk memahami situasi dan kondisi tertentu dengan cara mencoba menerobos dan mendalami gejala-gejala yang terjadi serta menginterpretasikannya dan menyimpulkannya. Secara spesifik penelitian kualitatif ini menggunakan tipe deskriptif, di mana peneliti berusaha mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi secara utuh dan sistematis. Tipe penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel yang satu dengan yang lain.<sup>50</sup>

### **1.9.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan tipe wawancara lapangan yang dilakukan dengan wawancara kepada sejumlah aktor yang berkaitan dengan penelitian ini, di halaman selanjutnya adapun tempat yang akan di kunjungi adalah:

---

<sup>49</sup> Agus Salim, (ed.). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2001, hal. 11

<sup>50</sup> Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit ALFABETA. 2010. Hal. 11.

- a. Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, terutama pada direktorat yang membawahi terkait diplomasi ekonomi dan hukum serta yang menangani sengketa di wilayah Asia.
- b. Badan Keamanan Laut RI di Jakarta, terutama pada direktorat yang menangani tentang keamanan laut.

### **1.9.3. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari subyek langsung yang didapat melalui observasi dan wawancara dengan subyek-subyek penelitian. Data Sekunder akan lebih menitik beratkan pada telaah pustaka atau *library research* yang akan di peroleh dari berbagai buku, dokumen, jurnal, koran, majalah, website dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.9.4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Wawancara Mendalam ( *Depth Interviews* )**

Wawancara mendalam dilaksanakan kepada semua informan yang ada. *Interview* atau wawancara ini dilengkapi atau dibantu dengan adanya daftar pertanyaan. Penggunaan *interview guide* dimaksudkan untuk lebih memfokuskan suatu pertanyaan dan jawaban yang diinginkan, karena sering kali wawancara bisa melebar dan tidak terkendali.

## 2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di lingkungan kerja atau kantor dari kementerian luar negeri dan Badan keamanan laut. Yang termasuk dalam obyek observasi adalah bagaimana suasana kantor, bagaimana para pegawai bekerja dalam tugasnya masing-masing, bagaimana hal-hal terkait penelitian ini dilakukan dan bagaimana gambaran secara deskriptif tentang keadaan kantor. Observasi juga dapat berfungsi sebagai cross-cek informasi dari informan yang telah di wawancarai.

## 3. Penggunaan Dokumentasi

Data dokumentasi dimaksudkan untuk mendukung data yang di dapat dari wawancara (data primer). Selain itu dokumentasi penting juga untuk melihat data tertulis yang menunjukkan keterangan dinamika suatu lembaga atau dokumentasi setiap kegiatan lembaga. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi, baik dokumen internal maupun eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, laporan, dan sebagainya yang merupakan informasi tentang keadaan, aturan, disiplin, proses dan lainnya. Dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pemerintah, pendidikan serta lembaga lain (majalah, koran, buletin, artikel, jurnal dan lainnya) yang relevan dengan penelitian ini.

### **1.9.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif, di mana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta- fakta yang ada kemudian dihubungkan antar fakta fakta, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Seperti yang di katakan Stuart. A. Schlegel bahwa model analisis kualitatif dapat berbentuk data → analisis data dan hipotesa dari data yang di dapatkan → teori yang dipakai.<sup>51</sup>

### **1.9.6. Teknik Pengambilan Kesimpulan**

Teknik pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teknik deduksi. Teknik ini dilakukan untuk melihat sebuah fenomena dari prinsip yang bersifat umum ke khusus. Kemudian menguji proposisi yang bersifat khusus tersebut apakah bisa di jelaskan atau diramalkan oleh teori yang dimiliki. Metode deduktif merupakan strategi penelitian yang berangkat dari sebuah teori secara eksplisit di mana peneliti akan membuat parameter rancangan penelitian sebagai arah dan patokan untuk membuktikan teori tersebut. Mengingat teori akan di uji maka teori tersebut diturunkan tingkat abstraksinya, dalam bentuk model untuk membentuk hipotesa atau jawaban sementara untuk melihat hubungan kausalitas antara gabungan konsep yang ada.

---

<sup>51</sup> Schlegel, S. A., *Penelitian Graunded Dalam Ilmu-Ilmu Sosial*, Surakarta: FISIPOL UNS. 1986. Hal.13.

### **1.9.7. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini penulis mendeskripsikan latar belakang tentang kebijakan geopolitik politik Indonesia dalam konflik Laut China Selatan Blok-Natuna. Kemudian dimunculkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, serta kerangka teoritik yang disambung dengan metodologi penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan sebagai dasar penyusunan laporan penelitian.

Bab II Faktor Geopolitik Dalam Kemaritiman Indonesia, pada bab ini penulis mendeskripsikan faktor-faktor geopolitik dalam kemaritiman Indonesia. Faktor sumberdaya dan kekayaan kemaritiman Indonesia, termasuk sumber daya ekonomi, kelautan dan perikanan, potensi jalur perdagangan internasional, dan potensi pariwisata yang menjadi wilayah kerja KKP, ESDM, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pariwisata di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia. Faktor pertahanan dan keamanan wilayah laut yang mencakup wilayah kerja Kementerian Pertahanan, Badan Keamanan Laut serta Kementerian Luar Negeri terkait diplomasi politik, hukum dan ekonomi.

Bab III Permasalahan Geopolitik Di Laut China Selatan, Pada bab ini penulis mendeskripsikan berbagai permasalahan yang terjadi di Laut China Selatan yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara. Permasalahan meliputi sengketa batas negara (termasuk klaim sepihak suatu wilayah), masalah

pencurian ikan, masalah penyelundupan dan perdagangan orang, perdagangan senjata ilegal dan penyelundupan narkoba.

Bab IV Kebijakan Indonesia Terhadap Isu Konflik Blok-Natuna Di Laut China Selatan, pada bab ini penulis menjelaskan terkait kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terkait dengan isu konflik Blok-Natuna di Laut China Selatan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan tersebut meliputi empat bidang kebijakan, yaitu kebijakan geopolitik Indonesia, kebijakan pertahanan dan keamanan, kebijakan hukum dan diplomasi, serta kebijakan diplomasi ekonomi. Kebijakan tersebut diupayakan untuk menghadapi dan mengantisipasi konflik di Laut China Selatan, terutama terkait dengan Blok-Natuna. Analisis dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer serta dihubungkan dengan teori-teori yang digunakan pada bab I.

Bab V Kesimpulan, pada bab ini penulis membuat kesimpulan yang berisi tentang hasil penelitian secara umum yang mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis penelitian.